

Persepsi Wisatawan Asing Terhadap Daya Tarik Pariwisata Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia

Ersa Tri Fitriasari

Widyaiswara BPSDM West Kalimantan Province
ersa3.dhobithoh@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the perception of foreign tourists on vacation in Indonesia-Malaysia border region. The acceleration of development in border region is followed by the strategic steps in increasing the tourists through the management of the use of natural resources and human resources as a reflection of the frontline of the Republic of Indonesia. With the attraction of tourism can open investment opportunities, job vacancy for the poor local residents, open isolation with improved infrastructure. With Law No. 6 of 2014 regarding to the Village Autonomy in handling and managing existing natural resources and the development of village-owned enterprises as an effort to increase the community income and to handling the community services problems in the Malaysian border region as well as being a regional innovation within the framework of autonomy area. The results of the study using a qualitative approach as the main approach and quantitative approach as a supporter can be concluded that the results of the cross tabulation analysis test informants' perceptions that the distortion of tourism in the border region attracts foreign tourists with natural potential that can be used as a source of regional income. In-depth interview results show that the potential of border natural resources is exploited and tourism investment opportunities are opened by integrating the cultural, economic and environmental sectors by prioritizing the principle of inter-sectoral integration and village independence by optimizing the villages in the border region.

Keywords: Perception, Tourism, Attraction, Border Areas

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wisatawan asing terhadap kunjungan wisata di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Percepatan pembangunan wilayah perbatasan diikuti oleh langkah strategi dalam peningkatan wisatawan melalui pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia sebagai cerminan garda depan NKRI. Dengan daya tarik wisata dapat membuka peluang investasi, membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal yang rata-rata miskin, membuka isolasi dengan peningkatan infrastruktur. Dengan Undang-undang tentang Desa no 6 tahun 2014 maka Otonomi Desa dalam mengurus dan mengelola sumberdaya alam yang ada serta pengembangan Badan usaha Milik desa sebagai wadah usaha peningkatan pendapatan masyarakat dan untuk mengatasi pelayanan kepada masyarakat di wilayah perbatasan Malaysia serta merupakan inovasi regional dalam kerangka otonomi daerah. Hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan utama dan pendekatan kuantitatif sebagai pendukung dapat disimpulkan bahwa hasil uji analisis tabulasi silang persepsi informan bahwa destinasi wisata di wilayah perbatasan menarik wisatawan asing dengan potensi alam yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah.

Hasil interview mendalam bahwa potensi sumberdaya alam perbatasan dieksploitasi dan dibuka peluang investasi pariwisata dengan memadukan sektor budaya, ekonomi dan lingkungan dengan mengutamakan prinsip keterpaduan antar sektor dan kemandirian desa dengan mengoptimalkan desa-desa wilayah perbatasan.

Kata kunci: Persepsi, Pariwisata, Daya Tarik, Wilayah Perbatasan

Pendahuluan

Secara geografis Kabupaten Sambas Kecamatan Sajingan Besar wilayah Indonesia berbatasan dengan Serawak Malaysia. Lokasi tempat wisata mempunyai magnet untuk dikunjungi baik wisatawan lokal dan wisatawan asing mengingat potensi sumber daya alam dan keanekaragaman flora dan fauna sudah populer di telinga para wisatawan. Wilayah perbatasan sebagai studi kasus dilatarbelakangi adanya fenomena di mana wilayah perbatasan Kecamatan Sajingan Besar juga menjadi daerah terbelakang dari sistem pusat-pusat permukiman yang ada di wilayah yang ada di Kalimantan Barat secara umum. Selain itu berkaitan dengan potensi sumber daya alam dan pembangunan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam untuk pariwisata.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor unggulan yang sangat penting bagi setiap negara dalam upaya peningkatan devisa negara, penciptaan lapangan kerja, pengembangan budaya dan edukasi, serta berbagai aktivitas usaha di sektor swasta yang mana semuanya merupakan kunci pertumbuhan ekonomi. Secara historis, pada level ASEAN awal 1980-an, Indonesia merupakan negara urutan ketiga yang sukses dalam penerimaan devisa sektor pariwisata, yakni setelah Singapura dan Thailand. Pada tahun 2016, Thailand menggungguli semua negara ASEAN dalam segi pertumbuhan pariwisata dengan 11,3 %, sementara persentase Indonesia sebesar 9,5% (Kompas, 12/2/2016).

Pemerintah Indonesia terus meningkatkan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur pendukung guna menarik wisatawan domestik maupun asing. Pada tahun 2017, pemerintah menargetkan 15 juta wisatawan asing datang ke Indonesia, sektor pariwisata diharapkan menyumbangkan devisa terbesar untuk negara. Dalam kebijakan nasional desentralisasi pengembangan ekonomi daerah, sektor pariwisata merupakan sektor strategis yang dapat dijadikan upaya untuk mewujudkan kebijakan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan agar pertumbuhan ekonomi di daerah dapat ditopang melalui pendapatan dari sektor pariwisata yang kuat dan berkelanjutan.

Menurut Nirwandar (2011:2) paradigma baru pembangunan kepariwisataan dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi merupakan kebijakan yang sangat strategis. Paradigma ini dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip-prinsip kebijakan kepariwisataan yang ditujukan untuk mewujudkan tujuh aspek kebijakan nasional yang fundamental. Ketujuh prinsip dimaksud adalah; (1) untuk membangun kesatuan dan persatuan bangsa, (2) untuk menghapus kemiskinan (*poverty alleviation*), (3) untuk pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*), (4) untuk melestarikan budaya (*culture preservation*), (5) untuk memenuhi kebutuhan hidup serta hak asasi manusia, (6) untuk meningkatkan ekonomi dan industri, (7) untuk mengembangkan teknologi. Melalui ketujuh prinsip tersebut, dapat dikatakan bahwa pemerintah provinsi atau kabupaten/kota senantiasa dituntut untuk berinovasi dan berkreasi guna mengembangkan potensi sektor pariwisata sebagai sektor kunci penggalan sumber pendapatan (APBD). Dengan kata lain, pimpinan

daerah seharusnya berkomitmen tinggi terhadap upaya perwujudan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan. Artinya, pimpinan daerah harus mampu secara efektif menerapkan kebijakan pengembangan sektor wisata dengan pendekatan pemanfaatan sumberdaya alam, potensi budaya, peningkatan ekonomi masyarakat, penghapusan kemiskinan, dan konservasi lingkungan. Dalam pengertian lain, negara yang sukses merancang dan mengembangkan pembangunan pariwisata adalah negara yang bertumpu pada sektor pariwisata.

Merujuk pada kebijakan Presiden Jokowi yang dimuat dalam buku Pengembangan Destinasi Pariwisata Indonesia 2016-2019, strategi yang ditempuh untuk percepatan pembangunan destinasi pariwisata di Indonesia ialah dengan menetapkan 25 kawasan strategis pariwisata nasional sebagai prioritas di tahun 2015-2019. Wilayah perbatasan Sajingan Besar memiliki potensi wisata yang relatif banyak, namun belum dikelola secara optimal. Kecamatan Sajingan Besar memiliki objek wisata alam seperti Air Terjun Riam Berasap di desa Kaliau, Goa Alam Santok di Desa Santaban dan Air Terjun Riam Cagat, serta Riam Pencarek di desa Sungai Bening (RPJMD Kabupaten Sambas, 2017:11.1 1). Objek wisata yang cukup potensial adalah air terjun Riam Berasap yang terletak di Desa Kaliau Kecamatan Sajingan Besar.

Kecamatan Sajingan Besar memiliki letak yang strategis, tepatnya berada di ujung utara Kabupaten Sambas. Di sebelah Utara dan Barat Kecamatan Sajingan Besar berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur) (Kecamatan Sambas Dalam Angka 2018:3). Kecamatan Sajingan Besar memiliki luas wilayah sekitar 1.391,20 km². Tetapi luas yang masuk pada wilayah pengembangan dan pembangunan kawasan Sajingan Besar adalah Kecamatan Sajingan Besar seluas 62.378 ha (Pemerintah Kabupaten Sambas, 2017 : 2). Jarak Kecamatan Sajingan Besar ke Ibukota Provinsi Kalbar sejauh 272 km, sedangkan jarak ke Ibukota Kabupaten Sambas 89 km. (Bappeda Kabupaten Sambas. 2017:54). Dengan adanya percepatan pembangunan perbatasan di wilayah perbatasan Sajingan Besar diharapkan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Kajian Literatur

Persepsi Daya Tarik Pariwisata

Pariwisata merupakan semua kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan para wisatawan. Wisata ini berkenaan dengan semua pembangunan perhotelan, pemugaran cagar budaya, penciptaan tempat rekreasi, pengadaan acara pekan pariwisata, dan pengadaan angkutan. Berbagai aktivitas tersebut diharapkan mampu mendatangkan wisatawan ke tempat tersebut (Soekadijo, 1997:2).

Pariwisata juga dapat didefinisikan sebagai suatu kejadian yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan insan manusia yaitu kegiatan perjalanan atau travel. Perjalanan tersebut terjadi karena ada rasa keingintahuan guna keperluan reaktif dan edukatif (Kodhyat, 1996:1).

Gafur dkk (2006:30) menyatakan bahwa wilayah perbatasan Sajingan Besar merupakan wilayah yang strategis. Posisi wilayah perbatasan khususnya di Kecamatan Sajingan Besar merupakan wilayah yang sangat potensial dan prospektif untuk dikembangkan menjadi daerah ekowisata. Wilayah perbatasan Kecamatan Sajingan Besar memiliki potensi SDA yang relatif cukup, tetapi sejauh ini upaya pengelolaannya belum

dilakukan secara optimal. Sebagian besar wilayah Kecamatan Sajingan Besar memiliki hamparan gunung yang memiliki aneka flora dan fauna serta keindahan alam. Kecamatan Sajingan Besar juga memiliki cukup banyak potensi tambang dengan kandungan deposit yang cukup besar, diantaranya adalah pasir kuarsa, kaolin, antimon, tembaga dan, pasir laut. Sementara di sektor perkebunan, tanaman yang diusahakan adalah karet, kakao, lada, durian dan kopi. Kawasan di sekitar aliran sungai juga telah dikembangkan pertanian lahan kering dengan komoditas kedelai dan jagung. (Gafur, dkk, 2006:31-32).

Persepsi berasal dari kata *perception* (Inggris) yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Beberapa ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Menurut Slameto dalam Handayani, (2013: 12) persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi dalam otak manusia secara terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya melalui indranya, yaitu indra penglihatan, pendengaran, peraba, perasa dan penciuman. Salah satu alasan mengapa persepsi demikian penting dalam hal menafsirkan keadaan sekeliling kita adalah bahwa kita masing-masing mempersepsi, tetapi mempersepsi secara berbeda, apa yang dimaksud dengan sebuah situasi ideal. Persepsi merupakan sebuah proses yang hampir bersifat otomatis dan ia bekerja dengan cara yang hampir serupa pada masing-masing individu, tetapi sekalipun demikian secara tipikal menghasilkan persepsi-persepsi yang berbeda-beda. Pengertian persepsi menurut Slameto (2003: 102) menyatakan persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan dan informasi di dalam otak manusia. Informasi dan pesan yang diterima tersebut muncul dalam bentuk stimulus yang merangsang otak untuk mengolah lebih lanjut yang kemudian mempengaruhi seseorang dalam berperilaku. Selanjutnya menurut Rakhmat (2004: 37-43) mengklasifikasi ke dalam tiga komponen yaitu komponen afektif, komponen kognitif dan komponen konatif. Komponen yang pertama, afektif yang merupakan aspek emosional dari faktor sosiopsikologis. Komponen kognitif adalah aspek intelektual, yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia. Komponen konatif adalah aspek volisional, yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak.

Persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensori mereka untuk memberi arti pada lingkungan mereka (Robbins, 2002: 46). Sedangkan Hamner dan Organ dalam Adam I. Indrawijaya (1989: 45) menyatakan bahwa persepsi adalah: "*The Process by which people organize, interpret, experience, and process cues or material (input) received from the external environment.* (Suatu proses di mana seseorang mengorganisasikan dalam pikirannya, menafsirkan, mengalami, dan mengolah pertanda atau segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya). "Bagaimana segala sesuatu tersebut mempengaruhi persepsi seseorang, nantinya akan mempengaruhi pula perilaku yang akan dipilihnya. Duncan dalam Miftah Thoha (1993:139) juga berpendapat bahwa persepsi dapat dirumuskan dengan berbagai cara, tetapi dalam ilmu perilaku khususnya psikologi, istilah ini digunakan untuk mengartikan perbuatan yang lebih dari sekedar mendengarkan, melihat atau merasakan sesuatu. Konsep tentang sikap telah berkembang dan melahirkan berbagai macam pengertian diantara ahli psikologi (Widiyanta, 2002). Sikap, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai kesiapan untuk bertindak. Sedangkan menurut Oxford

Advanced Learner Dictionar (dalam Ramdhani, 2008), sikap merupakan cara menempatkan atau membawa diri, merasakan, jalan pikiran, dan perilaku sikap yang dapat diamati seringkali menjadi perdebatan para ahli terkait konsistensinya dengan sikap individu.

Widayanta (2002), mengartikan sikap sebagai suatu keadaan siap yang dipelajari untuk merespon secara konsisten terhadap objek tertentu yang mengarah pada arah yang mendukung (*favorable*) dan tidak mendukung (*unfavorable*). Azwar, dalam Ananda (2009), menggolongkan definisi sikap ke dalam tiga kerangka pemikiran. Pertama, sikap merupakan suatu bentuk reaksi atau evaluasi perasaan. Dalam hal ini, sikap seseorang terhadap suatu objek tertentu adalah memihak maupun tidak memihak. Kedua, sikap merupakan kesiapan bereaksi terhadap objek tertentu, Ketiga, sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi satu sama lain. Menurut Allport, sikap merupakan suatu proses yang berlangsung dalam diri seseorang yang didalamnya terdapat pengalaman individu yang akan mengarahkan dan menentukan respon terhadap berbagai objek dan situasi (Sarwono, 2009). Zanna dan Rempel (dalam Voughn dan Hoog, 2002) menjelaskan sikap merupakan reaksi evaluatif yang disukai atau tidak disukai terhadap sesuatu atau seseorang, menunjukkan kepercayaan, perasaan, atau Kecaman cenderung perilaku seseorang (Sarwono, 2009). Thurstone (dalam Edwards, 1957), menyatakan bahwa sikap merupakan suatu tingkatan afeksi, baik yang bersifat positif maupun negatif, yang berhubungan dengan objek-objek psikologis. Afeksi yang positif merupakan afeksi yang menyenangkan dan sebaliknya afeksi yang negatif merupakan afeksi yang tidak menyenangkan. Dengan demikian objek dapat menimbulkan berbagai macam sikap, dan berbagai macam tingkatan afeksi pada seseorang (Walgito, 2003). akan mengarahkan dan menentukan respon terhadap berbagai objek dan situasi (Sarwono, 2009). Zanna dan Rempel (dalam Voughn dan Hoog, 2002) menjelaskan sikap merupakan reaksi evaluatif yang disukai atau tidak disukai terhadap sesuatu atau seseorang, menunjukkan kepercayaan, perasaan, atau Kecenderungan perilaku seseorang (Sarwono, 2009).

Wilayah Perbatasan

Pemerintah daerah mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaa pembangunan daerah yang berkesinambungan, yaitu dengan terus menerus membangun sarana dan prasarana umum serta untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang sesuai cita-cita bangsa. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan peran tersebut dilaksanakan oleh unsur pelaksana (unsur lini) di daerah tersebut yaitu dinas-dinas dan badan-badan daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki wewenang mengatur rumah tangga daerahnya, salah satunya dalam penentuan strategi percepatan pembangunan kawasan perbatasan (Kecamatan Sajingan Besar) yang berperan langsung adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas.

Yasyin (1995:108) menjelaskan bahwa kawasan adalah sama dengan wilayah atau daerah, namun daerah lebih dekat dengan arti kata lingkungan. Selanjutnya, kawasan ataupun wilayah ini didefinisikan dengan dua sudut pandang oleh Glasson (dalam Tarigan, 2004:99) yakni:

1. Cara pandang subjektif

Cara pandang subjektif merupakan cara pandang wilayah. Merupakan alat untuk mendefinisikan lokasi yang didasarkan pada kriteria tertentu.

2. Cara pandang objektif

Cara pandang objektif merupakan cara pandang wilayah adalah kenyataan yang bisa dibedakan dengan ciri atau gejala alam pada setiap daerah.

Marinez dalam Tirtosudarmo (2005:5) mengelompokkan kawasan perbatasan berdasarkan konteks masing-masing tipe yang tidak dianggap memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari pada kawasan yang lainnya.

Menurut Tirtosudarmo (2005:3), “Perbatasan negara merupakan sebuah ruang geografis yang sejak awal telah menjadi wilayah perebutan kekuasaan antar negara, yang terutama ditandai oleh adanya pertarungan untuk memperluas batas-batas antarnegara”. Beliau juga mengemukakan konsep tentang negara bangsa yang memiliki batas-batas teritorial yang jelas kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui proses kolonialisme. Dalam konteks semacam ini, batas-batas negara harus secara tepat ditentukan, secara jelas didemarkasi, dijaga secara ketat dan bersifat eksklusif. Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dikemukakan bahwa batas negara ialah sebuah garis yang memisahkan sistem sosial yang berbeda, daerah perbatasan menjadi wilayah yang bersifat marjinal yang legitimasinya tergantung karena adanya hubungan dan partisipasi dalam sosial yang ditentukan di pusat, sehingga bukan sekedar sistem sosial yang unik.

Era otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerah. Pengembangan ini dilakukan dengan membidik peluang ekonomi (bisnis) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Salah satu program yang diharapkan dapat terkait langsung dengan masyarakat pedesaan yakni dengan meningkatkan sektor wisata agrowisata. Kendala muncul akibat kurangnya sinergi antara kebijakan pemerintah (ego sektoral). Faktor lainnya adalah kurangnya koordinasi antara kebijakan dan peraturan terkait dengan kepariwisataan.

Ketidakpastian kebijakan pihak pemerintah berdampak pada ragu-ragunya berbagai pihak yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi di sektor pariwisata. Hal ini masih ditambah dengan adanya tumpang tindih berbagai peraturan berkenaan dengan tata ruang pada kawasan yang mempunyai potensi untuk berkembang menjadi kawasan wisata. Kebijakan pemerintah juga dikhawatirkan dapat mengganggu beberapa kawasan untuk pelestarian lingkungan. Kebijakan yang tidak terkoordinasi dengan baik dapat menjadi ancaman bagi masyarakat pedesaan. Perhatian pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah harus mengkonsentrasikan perhatian agar masalah tata ruang dapat diwujudkan dan pemanfaatan sumberdaya alam melalui pariwisata adalah sebagai salah satu meminimalkan permasalahan di wilayah perbatasan.

Belakangan ini permasalahan di perbatasan menjadi sorotan tajam akademisi dan birokrat, baik pemerintah pusat serta daerah. Stigma negatif muncul akibat wilayah perbatasan yang menjadi tempat tenaga kerja ilegal (*illegal workers*), penyelundupan (*smuggling*), pembalakan hutan (*illegal logging*) dan kemiskinan. Pembangunan di daerah perbatasan yang tertinggal serta munculnya ketegangan juga menjadi jalan bagi larinya teroris. Kondisi seperti ini menyebabkan citra yang negatif terhadap apa yang disebut “perbatasan” hingga mengusik perdamaian yang sebelumnya telah tercipta di perbatasan.

Musa, dkk.(2001) dalam penelitiannya memaparkan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berperan untuk percepatan pembangunan nasional. Akan tetapi, pada kenyataannya konsep pariwisata berkelanjutan di Indonesia menemui banyak hambatan baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya.

Kebijakan dalam bidang pariwisata yang belum dan terpadu merupakan permasalahan yang sering muncul. Pemerintah beserta seluruh anggota masyarakat perlu diberikan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan untuk aktivitas sosial serta produksi ekonomi. Demi pelaksanaan program ini diperlukan pemantauan yang kritis, terlebih pemantauan oleh unsur masyarakat sipil.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan utama dan pendekatan kuantitatif sebagai pendukung. Untuk pendekatan riset ini merupakan kombinasi analisis dari dua atau lebih metodologi seperti halnya multiriset yang dilakukan survey data dengan studi laboratorium experimental, observasi, analisis statistik yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati dalam interpretasi kualitatif. Adanya pandangan dari Julia Brannen yaitu: Qualitative and Quantitative Research (Social Policy (1997:2) menekankan bahwa penelitian digunakan untuk menghasilkan hasil penelitian yang komprehensif atau gambaran yang lebih beragam.

Penelitian ini dilakukan di wilayah perbatasan Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk sumber data primer yaitu data dari para tokoh adat, masyarakat lokal dan stakeholder diperoleh 28 informan dengan rincian terlampir dan instrument penelitian berupa kuesioner kepada 30 wisatawan asing yang melakukan kunjungan ke wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas.

Pembahasan

Analisis Tabulasi Silang Persepsi Informan Terhadap Daya Tarik Pariwisata di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia

1. Tabulasi Silang antara Jenis Kelamin Responden Terhadap Wisata

Tabel 1
Tabulasi Silang antara Usia terhadap Keamanan Wisata

		Keamanan					Total (%)
		Sgt tdk Aman (%)	Tidak Aman (%)	Cukup Aman (%)	Aman (%)	Sgt Aman (%)	
Usia Resp	kurang 20 th	0 (0,0)	1 (1,1)	2 (2,3)	6 (6,8)	3 (3,4)	12 (13,6)
	20 th sd 29 th	0 (0,0)	0 (0,0)	4 (4,5)	9 (10,2)	00 (0,0)	13 (14,8)
	30 th sd 39 th	0 (0,0)	0 (0,0)	6 (6,8)	6 (6,8)	2 (2,3)	14 (15,9)
	40 th sd 49 th	0 (0,0)	0 (0,0)	10 (11,4)	28 (31,8)	1 (1,1)	39 (44,3)
	50 th sd 59 th	0 (0,0)	0 (0,0)	4 (4,5)	3 (3,4)	0 (0,0)	7 (8,0)
	60 th sd 69 th	1 (1,1)	00 (0,0)	1 (1,1)	1 (1,1)	00 (0,0)	3 (3,4)
Total (%)		1 (1,1)	1 (1,1)	27 (30,7)	53 (60,2)	66 (6,8)	88 (100,0)

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kelompok terbanyak adalah responden yang berumur antara 40 sampai dengan 49 tahun yang menyatakan bahwa keamanan pada wisata adalah aman yaitu sebesar 31,8 %. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan persepsi pada kondisi keamanan menurut usia responden. Pada kelompok yang berumur 40 sampai dengan 49 tahun menyatakan bahwa keamanan di wisata adalah lebih aman dibandingkan pada kelompok yang lainnya.

2. Tabulasi Silang antara Jenis Kelamin Responden terhadap Transportasi

Tabel 2
Silang antara Jenis Kelamin terhadap Transportasi wisata

		Transportasi					Total(%)
		Sgt tdk baik (%)	Tidak Baik (%)	Cukup Baik (%)	Baik (%)	Sangat Baik (%)	
Jenis Kela min	Laki-laki	1 (1,1)	1 (1,1)	24 (27,3)	33 (37,5)	3 (3,4)	62 (70,5)
	Perempuan	0 (0,0)	2 (2,3)	14 (15,9)	7 (8,0)	3 (3,4)	26 (29,5)
Total(%)		1 (1,1)	3 (3,4)	38 (43,2)	40 (45,5)	6 (6,8)	88 (100,0)

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kelompok terbanyak adalah responden yang berjenis kelamin laki – laki yang menyatakan bahwa transportasi di wisata sudah baik yaitu sebesar 37,5 %. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan persepsi pada transportasi menurut jenis kelamin responden. Pada kelompok laki – laki menyatakan bahwa transportasi di wisata adalah lebih baik dibandingkan pada kelompok yang lainnya.

3. Tabulasi Silang antara Kebangsaan Wisatawan terhadap Kondisi Pos Lintas Batas

Berikut ini tabulasi silang antara jumlah Kebangsaan Wisatawan dengan variabel Kondisi Pos Lintas Batas

Tabel 3
Tabulasi Silang antara Kebangsaan Wisatawan terhadap Kondisi Pos Lintas Batas

		Kondisi Pos Lintas Batas				Total (%)
		Sgt tdk baik (%)	Cukup Baik (%)	Baik (%)	Sangat Baik (%)	
Kebangsaan	America	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (1,1)	0 (0,0)	1 (1,1)
	Brunei	0 (0,0)	1 (1,1)	1 (1,1)	0 (0,0)	2 (2,3)
	Cina	0 (0,0)	1 (1,1)	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (1,1)
	Hongkong	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (1,1)	1 (1,1)
	Malaysia	1 (1,1)	10 (11,4)	53 (60,2)	16 (18,2)	80 (90,2)
	Melayu	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (1,1)	1 (1,1)
	Taiwan	0 (0,0)	0 (0,0)	2 (2,3)	0 (0,0)	2 (2,3)
Total (%)		1 (1,1)	12 (13,6)	57 (64,8)	18 (20,5)	88 (100,0)

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kelompok terbanyak adalah responden yang berkebangsaan Malaysia yang menyatakan bahwa kondisi pos lintas batas pada kondisi yang baik yaitu sebesar 60,2 %. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan persepsi pada persepsi mengenai kondisi lintas batas menurut kebangsaan wisatawan. Pada wisatawan dari Malaysia menyatakan bahwa kondisi pos lintas batas adalah lebih baik dibandingkan pada wisatawan dari kebangsaan yang lainnya.

4. Tabulasi Silang antara Pendidikan terhadap Pelayanan Petugas Lintas Batas

Berikut ini tabulasi silang antara Pendidikan dengan variabel pelayanan lintas batas

Tabel 4
Tabulasi Silang antara Pendidikan terhadap Pelayanan Lintas Batas

		Pelayanan Petugas Lintas Batas					Total (%)
		Sangat tidak Baik (%)	Tidak Baik (%)	Cukup Baik (%)	Baik (%)	Sangat Baik (%)	
Pendidikan	SMA	1 (1,1)	1 (1,1)	11 (12,5)	39 (44,3)	8 (9,1)	60 (68,2)
	S1	0 (0,0)	0 (0,0)	6 (6,8)	14 (15,9)	6 (6,8)	26 (29,5)
	S3	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	2 (2,3)	0 (0,0)	2 (2,3)
Total (%)		1 (1,1)	1 (1,1)	17 (19,3)	55 (62,5)	14 (15,9)	88 (100,0)

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kelompok terbanyak adalah responden yang berlatar belakang pendidikan SMA atau sederajat yaitu sebanyak 68,2 % dan untuk persepsi pelayanan petugas lintas batas yang terbanyak adalah menyatakan bahwa pelayanan dalam kategori yang sudah baik yaitu 62,5 %. Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa yang tertinggi adalah responden dengan latar belakang SMA atau sederajat menyatakan bahwa pelayanan petugas lintas batas adalah baik, yaitu sebesar 44,3 %. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan persepsi pada persepsi mengenai pelayanan petugas lintas batas menurut latar belakang pendidikan wisatawan. Para wisatawan yang berlatar belakang pendidikan SMA atau sederajat menyatakan bahwa pelayanan petugas lintas batas adalah lebih baik dibandingkan pada wisatawan dari latar belakang pendidikan yang lainnya.

5. Tabulasi Silang antara Kunjungan terhadap Akomodasi

Berikut ini tabulasi silang antara Kunjungan dengan Akomodasi

Tabel 5
Tabulasi Silang antara Kunjungan terhadap Akomodasi

		Akomodasi/Hotel				Total (%)
		Tidak Baik (%)	cukup baik (%)	Baik (%)	Sangat baik (%)	
Kunjungan ke	1.00	4 (4,5)	12 (13,6)	13 (14,8)	1 (1,1)	30 (34,1)
	2.00	5 (5,7)	10 (11,4)	1 (1,1)	1 (1,1)	17 (19,3)
	3.00	5 (5,7)	17 (19,3)	10 (11,4)	0 (0,0)	32 (36,4)
	4.00	2 (2,3)	3 (3,4)	1 (1,1)	0 (0,0)	6 (6,8)
	5.00	0 (0,0)	1 (1,1)	1 (1,1)	0 (0,0)	2 (2,3)
	20.00	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (1,1)	0 (0,0)	1 (1,1)
Total (%)		16 (18,2)	43 (48,9)	27 (30,7)	2 (2,3)	88 (100,0)

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kelompok terbanyak adalah responden yang telah berkunjung sebanyak 3 kali yaitu sebanyak 36,4 % dan untuk persepsi akomodasi/hotel yang terbanyak adalah menyatakan akomodasi dalam kategori yang masih cukup baik yaitu 48,9 %. Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa yang tertinggi adalah responden yang telah berkunjung sebanyak 3 kali menyatakan bahwa akomodasi adalah cukup baik, yaitu sebesar 19,3 %. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan persepsi pada persepsi mengenai akomodasi yang diberikan menurut jumlah kunjungan dari wisatawan. Para wisatawan yang telah berkunjung 3 kali menyatakan bahwa akomodasi masih cukup baik dibandingkan pada wisatawan tingkat kunjungan yang lainnya.

6. Tabulasi Silang antara Tujuan Kunjungan terhadap Wisata

Berikut ini tabulasi silang antara Tujuan Kunjungan dengan Wisata

Tabel 6
Tabulasi Silang antara Tujuan Kunjungan terhadap wisata

		Wisata				Total (%)
		Tidak Baik (%)	Cukup Baik (%)	Baik (%)	Sangat Baik (%)	
Tujuan kunjungan	Rekreasi	8 (9,1)	17 (19,3)	13 (14,8)	2 (2,3)	40 (45,5)
	Mengunjungi Keluarga	7 (8,0)	13 (14,8)	9 (10,2)	1 (1,1)	30 (34,1)
	Belanja	2 (2,3)	4 (4,5)	2 (2,3)	0 (0,0)	8 (9,1)
	Bisnis	1 (1,1)	2 (2,3)	0 (0,0)	0 (0,0)	3 (3,4)
	Lainnya	0 (0,0)	0 (0,0)	3 (3,4)	1 (1,1)	4 (4,1)
	rekreasi dan mengunjungi kel	1 (1,1)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (1,1)
	Rekreasi, menggi Kel dan lainnya	1 (1,1)	1 (1,1)	0 (0,0)	0 (0,0)	2 (2,3)
Total (%)		20 (22,7)	37 (42,0)	27 (30,7)	4 (4,5)	88 (100,0)

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kelompok terbanyak adalah responden yang tujuan berkunjung adalah untuk berekreasi yaitu sebanyak 45,5 % dan untuk persepsi terhadap kondisi restaurant yang terbanyak adalah menyatakan restaurant akomodasi dalam kategori yang masih cukup baik yaitu 42 %. Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa yang tertinggi adalah responden yang mempunyai tujuan berkunjung untuk berekreasi menyatakan bahwa restaurant adalah cukup baik, yaitu sebesar 19,3 %. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan persepsi pada persepsi mengenai kondisi restaurant menurut tujuan kunjungan dari wisatawan. Para wisatawan yang berkunjung untuk rekreasi menyatakan bahwa restaurant masih cukup baik dibandingkan pada wisatawan dengan tujuan kunjungan yang lainnya.

7. Tabulasi Silang antara Keinginan Kunjungan Lagi terhadap Pariwisata

Berikut ini tabulasi silang antara Keinginan Kunjungan Lagi dengan Fasilitas yang memadai.

Tabel 7
Tabulasi Silang antara Keinginan Kunjungan Lagi terhadap Pariwisata

		Fasilitas Wisata					Total (%)
		Sangat tidak Baik (%)	Tidak Baik (%)	Cukup Baik (%)	Baik (%)	Sangat baik (%)	
Keinginan Kunjungan Lagi	Ikuti	1 (1,1)	8 (9,1)	22 (25,0)	20 (22,7)	1 (1,1)	52 (59,1)
	Tidak Ikuti	0 (0,0)	7 (8,0)	18 (20,5)	9 (10,2)	2 (2,3)	36 (40,9)
Total (%)		1 (1,1)	15 (17,0)	40 (45,5)	29 (33,0)	3 (3,4)	88 (100,0)

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah responden yang mengikuti kalau ada kunjungan lagi yaitu sebanyak 59,1 % dan untuk persepsi terhadap kondisi wisata yang terbanyak adalah menyatakan wisata masih cukup baik yaitu 45,5 %. Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa yang tertinggi adalah responden yang bermaksud mengikuti kunjungan kembali di kemudian hari menyatakan bahwa fasilitas wisata adalah cukup baik, yaitu sebesar 25 %. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan persepsi mengenai kondisi fasilitas wisata menurut keinginan kunjungan kembali dari wisatawan. Para wisatawan yang bermaksud berkunjung kembali menyatakan bahwa pariwisata baik dibandingkan pada responden yang lainnya.

Persepsi dan Sikap Para Pengambil Keputusan Terhadap Kebijakan Pariwisata di Wilayah Perbatasan.

Kebijakan merupakan rangkaian konsep serta asas yang menjadi pijakan (garis besar) dan dasar perencanaan untuk pelaksanaan suatu aktivitas (pekerjaan), kepemimpinan, dan cara bertindak; pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Federick dalam Agustino (2008:7) menjelaskan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok ataupun pemerintah di lingkungan tertentu yang terdapat hambatan (kesulitan) dan kesempatan ataupun peluang terhadap dilaksanakannya usulan dari kebijaksanaan tersebut untuk pencapaian tujuan. Wahab (2008: 40) mengemukakan bahwa istilah kebijakan ini masih silang pendapat dan menjadi ajang perdebatan para ahli.

Kebijakan pemerintah terkait wisata, terutama di daerah perbatasan, memerlukan kejelian dan perhatian yang lebih khusus. Selama beberapa decade, pemasalahan di perbatasan belum mendapat perhatian pemerintah. Kebijakan pembangunan di perbatasan masih kurang namun sebaliknya di daerah padat penduduk. Kebijakan nasional untuk menentukan arah, pendekatan, ataupun strategi pengembangan kawasan perbatasan belum tersusun dengan baik, akibatnya kawasan perbatasan kurang diperhatikan.

Berdasarkan konsep persepsi dan sikap sebagaimana diuraikan di atas berikut disajikan hasil penelitian tentang persepsi dan sikap para stakeholder, tokoh masyarakat dan masyarakat lokal dalam meningkatkan peluang dan daya tarik wisata di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Sagingan Besar.

- Ir. Arifidiar, MH selaku Ketua DPRD Kabupaten Sambas dan Hj. Haria SH. MH selaku Wakil Bupati Kabupaten Sambas, Drs. Suhairiah selaku pejabat Kementerian Pariwisata Jakarta bahwa Kecamatan Sajingan Besar adalah batas negara harus dilepaskan dari daerah tertinggal, minim infrastruktur dan kemiskinan diperlukannya program strategis di wilayah perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sehingga dapat ditangani rendahnya kesejahteraan masyarakat karena kurangnya optimal pelayanan sosial dasar yang menjangkau masyarakat di perbatasan mengakibatkan terhambatnya kegiatan ekonomi lokal karena terbatasnya sarana dan prasarana. Potensi Sumberdaya alam perbatasan dieksploitasi dan dibuka peluang investasi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang memadukan sektor budaya, ekonomi dan lingkungan dengan mengutamakan prinsip keterpaduan antar sektor dan kemandirian desa dengan mengoptimalkan desa-desa.
- Richmond selaku Kepala Emigrasi Pos Batas Biawak Negara Malaysia, Drs. Manto Saidi M.Si selaku Kepala Pos Lintas Batas Negara Aruk, Husni Thamrin SH.MH selaku Kepala Emigrasi Provinsi Kalimantan Barat dan Supardi S.Pd, MM selaku Camat Sajingan Besar bahwa wilayah perbatasan memiliki permasalahan yang kompleks yaitu TKI ilegal, illegal logging, pencemaran lingkungan (kabut asap) dan Narkoba selain itu wilayah perbatasan Kecamatan Sajingan Besar memiliki potensi wisata alam untuk menarik wisatawan asing dan lokal. Hal ini diperkuat dengan era pemerintahan Jokowi infrastruktur semakin baik dan perlunya rencana strategis untuk pengembangan pariwisata di wilayah perbatasan. Dengan program wisata akan menjadi salah satu alternatif program kerjasama antar negara.
- Drs H. Yusmadi, MH selaku Kepala Disdikbud Kabupaten. Sambas, Drs.H.Asmani, MH, Kepala Dinas Parpora Kabupaten. Sambas, Suhut Firmansyah. S.Sos. M.Si selaku Setda Perbatasan Kabupaten. Sambas, Ir. H. Daryanto MT selaku Kepala Bappeda Kabupaten. Sambas bahwa Potensi Sumberdaya alam perbatasan dieksploitasi dan dibuka peluang investasi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang memadukan sektor budaya, ekonomi dan lingkungan dengan mengutamakan prinsip keterpaduan antar sektor dan kemandirian desa dengan mengoptimalkan desa-desa. Dengan pariwisata untuk sebagai alternative pencegahan kerawanan dan kerusakan hutan sehingga mengancam kekayaan alam yaitu menjamurnya tanaman sawit mengancam sumberdaya air dan dapat merusak ekosistem perbatasan dan diharapkan angka kemiskinan mengalami penurunan dan mengurangi orientasi masyarakat perbatasan secara ekonomi kepada negara tetangga.
- Nampe selaku Kepala Desa Sebunga, Jamil selaku Kepala Desa Kaliau, Martinus selaku Dewan Adat, Lingga selaku Tokoh Adat Panglima, Supardi selaku Kepala BUMDes Kaliau dan Jerman Tokoh Masyarakat Desa Kaliau bahwa kebijakan pemerintah di perbatasan khususnya Sajingan Besar adanya sinkron dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dan infrastruktur yang dibangun dapat termanfaatkan optimal, melakukan upaya peningkatan perlindungan wilayah perbatasan untuk perlindungan batas negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan dengan potensi wisata mendatangkan wisatawan, informasi pariwisata wilayah perbatasan untuk mempublikasikan sebagai salah satu magnet untuk menarik wisatawan serta minimnya SDM dalam manajemen pengelolaan sumberdaya alam sehingga perlu peran pemerintah untuk mensinergikan program melalui Musrembang desa aspirasi desa ditindaklanjuti dan masyarakat terlibat melalui proses rapat dan skala prioritas

Komponen, Potensi dan Peluang Pariwisata Wilayah Perbatasan

Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam peramalan (*forecasting*). Salah satu alternatif untuk menyimpulkan data lampau adalah dengan menghitung rata-rata dari himpunan kecil berurutan dari data lampau. Rata-rata bergerak (*moving average*) untuk periode t adalah nilai rata-rata untuk n jumlah data terbaru. Untuk menggambarkan prosedur ini digunakan istilah rata-rata bergerak karena setiap muncul nilai rata-rata bergerak baru, dapat dihitung dengan cara membuang nilai pengamatan yang paling lama dan memasukkan nilai pengamatan yang paling baru. Rata-rata bergerak ini akan digunakan sebagai nilai peramalan untuk suatu periode ke depan (berikutnya). Model rata-rata bergerak tunggal (*single moving average*) ini paling cocok untuk data stasioner, tetapi tidak dapat bekerja dengan baik untuk data yang mengandung unsur trend atau musiman. Metode rata-rata bergerak dinotasikan dengan MA (M) yang artinya adalah periode (Putriaji, 2015). Adapun beberapa komponen potensi dan peluang pariwisata adalah sebagai berikut

Tabel : 9

Komponen, Potensi dan Peluang Pariwisata Wilayah Perbatasan

No	Komponen Pariwisata	Potensi Sumberdaya Air dan Hutan Lindung Sajingan Besar	Peluang Pengembangan Ekowisata			
			ST	T	R	SR
1	Wisata Alam (Flora dan Fauna)	Lokasi, jumlah, mutu dan daya tarik	☐			
2	Wisata Budaya (Atraksi budaya)	Lokasi, jenis, jumlah, mutu, daya tarik	☐			
3	Wisata Kuliner	jenis, jumlah, mutu, daya tarik	☐			
4	Jasa Lingkungan	Kondisi lingkungan fisik, ekologis, daya dukung		☐		
4	Aksesibilitas (infrastruktur)	Daya jangkau, akses, mutu, frekuensi, ongkos			☐	
5	Pasar Ekowisata	Daerah asal wisatawan Malaysia, Jawa, tipe perjalanan, tipe kegiatan		☐		
6	Usaha Jasa Masyarakat	Mutu, kesesuaian dengan pasar, masalah lain	☐			
7	Kebijakan Informasi Wisata	Mutu peta, buku panduan wisata, pemaparan, akurasi dan autentisitas				☐
8	Promosi	informasi Efektivitas advertensi, publisitas, kehumasan, insentif, moda promos				☐
9	Organisasi dan Kelembagaan	Organisasi terkait, hubungan kerja, kemitraan, teamwork pengembangan ekowisata			☐	
10	Komitmen Pelaku Wisata	Dukungan dari berbagai sektor, sikap publik dan masyarakat lokal terhadap pengembangan ekowisata	☐			
11	Kelembagaan Pengelola	Perintisan BUMDES				☐
12	Partisipasi Masyarakat	Modal sosial, gotong royong dan toleransi		☐		

Sumber : Analisis Peneliti, 2018

ST : Sangat Tinggi

T : Tinggi

R : Rendah

SR : Sangat Rendah

Penutup

Kesimpulan

Pariwisata di wilayah perbatasan sangat menarik untuk wisatawan asing. Keaslian alam yang masih terjaga perlunya untuk pemerintah kabupaten Sambas untuk melakukan pengembangan wisata sesuai dengan amanat kebijakan Presiden Jokowi membangun dari pinggiran atau perbatasan dan dituangkan dalam Nawacita. Kestinambungan integrasi program baik pusat hingga daerah dalam peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia melalui daya tarik wisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, solusi untuk penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Daya tarik wisata perbatasan strategis untuk dikunjungi dan dapat dijadikan destinasi baru mengingat jarak ke lokasi wisata lancar, terjamin untuk keamanan wisatawan, aneka jenis kuliner dan keramahan masyarakat lokal.

Saran

Prinsip otonomi desa sesuai Undang-Undang Desa no 6 tahun 2014 terkait dengan kewenangan Desa dalam upaya pengelolaan dana dan eksploitasi sumber daya tarik wisata, melalui Badan Usaha Desa (BUMDES) dan unsur-unsur terkait baik stakeholder, tokoh masyarakat dan masyarakat lokal. Hubungan bilateral antar negara melalui pariwisata mengarah keharmonisan hubungan diplomatik kedua negara, mengingat wisata budaya Indonesia-Malaysia adalah serumpun yaitu Dayak Salako, Dayak Bakathi' dan Melayu.

Penguatan citra diri masyarakat lokal terhadap NKRI dengan daya tarik wisata di wilayah perbatasan dengan peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berdampak pada kesejahteraan masyarakat dengan terjadinya peningkatan jumlah wisatawan baik lokal maupun asing. Direkomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Sambas untuk memanfaatkan hasil studi ini guna merancang kebijakan dalam pengembangan destinasi wisata di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia, khususnya wilayah Kecamatan Sajingan Besar yang berbatasan dengan wilayah Kuching Malaysia.

Daftar Pustaka

- Adam I, Indrawijaya. 1989. Perubahan dan Pengembangan Organisasi. Bandung: Penerbit Sinar Baru
- Agustino, Leo. 2008. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara
- Azwar, dalam Ananda, 2009. Psikologi Pendidikan. Bumi Aksara. Jakarta.
- Brannen, Julia. 2002. Memadu Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda.
- Dokumen Renstra Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas 2016
- Hubeis, Musa dkk. 1996. Kajian Teknologi dan Finansial Produksi Es Krim (Melorine) Skala Kecil. Jurnal Teknologi dan industri Pangan. Vol. VII no.1.

Kabupaten Sambas Dalam Angka 2016

Kecamatan Sajingan Besar dalam Angka, 2017

Kompas, Pertumbuhan Pariwisata Indonesia, 12/2/2016

Kodhyat, H.1996. *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*. Grasindo, Jakarta.

Miftah Thoha. 1993. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Nirwandari, S. (2006). *Pembangunan Sektor Pariwisata di Era Otonomi Daerah*

Oxford Advanced Learner Dictionar (2005). Oxford: Oxford University Press

RPJMD Bappeda Kabupaten Sambas 2012-2016

Rakhmat, Jalaluddin. (2004). *Psikologi Komunikasi*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung

Robbins, Stephen P. 2002. *Organizational Behavior*, Alih Bahasa Dr. Handayani Pujoatmoko, Jakarta; PT. Prenhallindo

Sarwono.2009. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka SarwonoPrawirohardjo

Soekadji, R.G, 1997. *Anatomi Pariwisata: Memahami Pariwisata Sebagai Sistem Linkage*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Slameto. (2015). *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Cetakan Keenam. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Tirtosudarmo, Riwanto. (2007). *Mencari Indonesia : Demografi Politik Pasca Soeharto*. Jakarta:

Undang-Undang RI No 6 tahun 2014 tentang Desa

Vouhgn, Graham M & M.A Hoog. 2002. *Social Psychology*. England: Prentice Hall.

Edwards, Allen, 1957, *Techniques of Attitude Scale Construction*, Appleton-Century-Crofts, Inc

Widiyanta, A. 2002. *Sikap Terhadap Lingkungan Alam (Tinjauan Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Lingkungan)*, <http://library.usu.ac.id> diakses pada 7 Januari 2011

Walgito, B. 2003. *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Andi Offset.

Yasyin, Suliichan. 1995. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya : Amanah.